



Kualitas Readymix Dievaluasi ✓

NEGARA, NusaBali

Tahun ini dua desa di Jembrana, masing-masing Desa Medewi Kecamatan Pekutatan, dan Desa Pergung Kecamatan Mendoyo mendapatkan program perbaikan jalan dengan readymix. Memastikan pengerjaannya bagus dan berkualitas, Wakil Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan langsung pimpin sidak ke dua lokasi proyek tersebut, Kamis (10/9).

Dua proyek readymix itu, spesifikasi pengerjaannya berbeda, dengan anggaran yang hampir sama yakni Rp 500 juta lebih. Readymix di Desa Medewi yang menghubungkan antara Banjar Delod Bale Agung dengan Banjar Dauh Pangkung Slepå hanya bisa dibuat sepanjang 455 meter. Pengerjaan readymix selebar 3 meter itu menggunakan petulangan besi dengan ketebalan 12 centimeter. Sedangkan readymix di Desa Pergung penghubung antara Banjar Pangkung Lubang dan Pangkung Apit bisa mencapai panjang 1,3 kilometer,



• NUSABALIM DIWANGKARA

WAKIL Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan sidak proyek readymix di Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Kamis (10/9).

tetapi tidak menggunakan petulangan besi dan memiliki ketebalan 10 centimeter.

Seusai sidak, Wabup Kembang mengatakan readymix diturunkan berdasarkan pertimbangan kualitas. Jalan kabupaten yang tidak mampu dihentikan dan sebelumnya dikerjakan dengan lapern dijadikan readymix sehingga lebih kuat. "Tadi

kita lihat ada perbedaan dari segi pengerjaan. Yang di Medewi kualitasnya lebih bagus. Tidak apa volumenya lebih sedikit, asalkan kualitasnya lebih bagus," katanya.

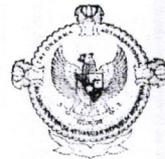
Wabup Kembang yang didampingi Kabid Bina Marga Dinas PU Jembrana, I Wayan Sudiarta, meminta seluruh pengerjaan readymix lebih mengedepankan kualitas. Kualitas yang

baik dibuat dengan kekuatan K225, ketebalan 14 centimeter menggunakan petulangan besi ukuran minimal M5. "Selanjutnya kita minta untuk jangka panjang. Walaupun dari sisi anggaran lebih banyak. Karena kalau yang bagus pakai petulangan besi bisa sampai 15 tahun. Kalau yang tidak isi petulangan, paling bertahan 7 tahun," ujarnya.

Wabup Kembang juga meminta warga sekitar untuk ikut menjaga jalan tersebut. Pihak desa diminta mampu melakukan perbaikan infrastruktur jalan maupun gang milik desa dengan memanfaatkan dana desa. "Jadi akan jelas pembagiannya. Kita ada 941 kilometer jalan kabupaten, waktu di awal menjabat, ada PR kerusakan jalan yang rusak sepanjang 600 kilometer. Sudah kita perbaiki sepanjang 500 kilometer secara bertahap. Sedangkan ada jalan desa sepanjang 901 kilometer, kita harapkan dikerjakan desa," tandas Kembang. **od**

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 7



Orang Miskin Buleleng Dijatah BPSP

713 Unit Rumah

SINGARAJA, NusaBali

Warga miskin di Buleleng boleh bergembira karena akan mendapatkan bantuan bedah rumah hingga hunian rumah baru. Alokasi yang ditetapkan adalah 713 unit rumah dan saat ini sedang dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial Buleleng untuk bisa mendapatkan dana BPSP (Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya) dari pemerintah pusat tersebut.

Wakil Bupati Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra, didampingi Kadisoc Buleleng Gede Komang, Kamis (10/9) mengatakan, bantuan berupa dana BPSP itu akan diberikan kepada warga kurang mampu. Untuk memastikan penerima bantuan tersebut, saat ini sedang dilaksanakan validasi data warga miskin dengan metode berbeda yakni *by name, by address* (siapa nama dan alamat jelas).

Dengan metode itu data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga bantuan yang dikucurkan nanti tepat sasaran, diterima oleh warga miskin yang memang membutuhkan. "Tahun ini kita mendapat BSPS dari pemerintah pusat sebanyak 713 unit," kata Wabup Sutjidra.

Dijelaskan, dukungan pemer-



WAKIL Bupati Nyoman Sutjidra saat serahkan bantuan kepada salah satu warga miskin di Buleleng.

intah pusat lewat BSPS ini diyakini dapat mengoptimalkan kembali penanganan masalah kemiskinan sosial masyarakat di Bali Utara. Apalagi dengan dukungan dari anggaran APBD melalui program bedah rumah dan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Balu juga mengucurkan bantuan bedah rumah, maka warga miskin yang tidak memiliki rumah layak huni akan dapat tertangani.

Sementara untuk kalangan lanjut usia (lansia) atau janda yang hidup sebatang kara, Pemkab Buleleng akan menangani dengan program pemberian paket sembako dan menitipkan ke panti jompo di daerah ini. "Pola penanganan terintegrasi ini sudah mulai memberikan hasil dan ini dibuktikan dengan data kemiskinan di daerah kita sudah muncul tren penurunan antara lima hingga enam persen

dari data sebelumnya," tegasnya.

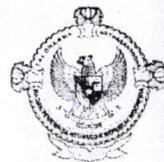
Di sisi lain Wakil Bupati Sutjidra mengatakan, pemutakhiran dan validasi data kemiskinan dilakukan sekaligus untuk mencocokkan kembali antara data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data yang dimiliki Dinsos Buleleng.

Selama ini masalah data kemiskinan antara dua lembaga pemerintah ini masih ada yang tidak cocok. Dengan pendataan dan validasi ulang ini, nantinya akan ditetapkan data kemiskinan yang akurat dan sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, data warga miskin sebelumnya ditetapkan dengan istilah rumah tangga sasaran (RTS) dengan kriteria rentan miskin, hampir miskin, dan miskin. Sekarang istilahnya dikembalikan menjadi data warga miskin.

Untuk itu, pendataan dan validasi ulang ini sangat penting dilakukan. "Data yang dikasih oleh BPS itu ada perbedaan dengan data kita, makanya kita sedang memvalidasi ulang dan data itu kita gunakan untuk menyusun program penanganan kemiskinan dan masalah sosial ke depannya," imbuh Wakil Bupati Sutjidra sembari diijak Kepala Dinas Sosial Gede Komang. **k19**

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 4



RPH Temesi Makin Memprihatinkan

RPH ini sudah cacat sejak 'dalam kandungan', sangat sulit menormalkan.

GIANYAR, NusaBali

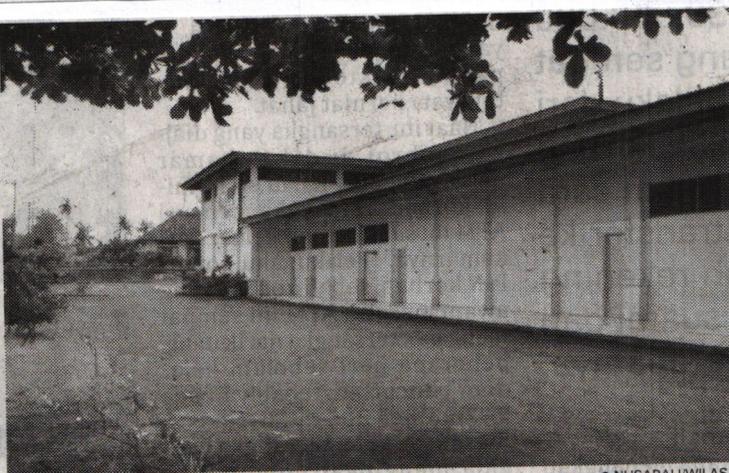
Nasib Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, makin memprihatinkan. Setelah berkali-kali gonta-ganti pengelola dari pihak ketiga, RPH ini kini kembali mangkrak.

Akibatnya, beberapa bagian bangunan dan peralatannya tak terurus. Dikonfirmasi, Kamis (10/9), Dirut Perusda (Perusahaan Daerah) Pemkab Gianyar Ir Putu Sugiawan mengakui, RPH yang dulunya dirancang Pusat dan Pemprov Bali, berkelas internasional ini kini

mengkarak kembali. Kemangkrakan terakhir sejak awal 2014 karena investor yang mengelola

RPH mundur sebelum setahun beroperasi. "Kini RPH ini masih menunggu investor lain. Beginilah, sulitnya karena istilahnya RPH ini sudah cacat sejak 'dalam kandungan', sangat sulit menormalkan," jelasnya. Cacat 'dalam kandungan' dimaksud karena masalah muncul dari ribetnya status kepemilikan RPH. Bangunan RPH milik Pemprov Bali, tanahnya milik Pemkab Gianyar,

dan penyediaan peralatannya dari Pusat. Akibatnya hingga saat ini tak jelas kepemilikan RPH ini. Dampaknya, proses permodalannya ribet. Sebelum dikelola, perintisan RPH sudah bermasalah saat pengadaan lahan yang berakibat dua mantan pejabat dan seorang makelar tanah tersangkut kasus korupsi penggelembungan harga lahan RPH.



• NUSABALI/WILASA

Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Gianyar yang memprihatinkan karena berkali-kali ditinggal pengelola.

Sebagaimana diketahui, mantan Sekda Gianyar AA Rai Asmara dan mantan Kadis Peternakan Gianyar/Kadis Peternakan Bali Ida Bagus Raka masing-masing kena hukuman 1,5 tahun penjara. Dan, makelar tanah RPH Kadek Aristana asal Penestanan, Ubud, kena hukuman setahun penjara. Mereka menghuni Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar.

Sugiawan menambahkan, Pemprov Bali melalui Perusda Bali dan Pemkab Gianyar melalui Perusda Gianyar membuat per-

sahaan patungan, PT Mergantaka Mandala (MM), untuk mengelola RPH ini. Namun perusahaan ini tidak jalan karena kesulitan mengakses modal akibat ketidakjelasan status kepemilikan RPH.

Senada Sugiawan, Kepala Bagian Ekonomi Setda Gianyar I Gede Windia Berata mengakui, RPH Temesi kini masih mangkrak. Pihaknya kini masih menunggu proses pengalihan status kepemilikan dengan permohonan ibah bangunan RPH kepada Pemprov Bali. Karena bangunan RPH ini dulunya dibangun Pemprov Bali. Harapannya, RPH ini satu kepemilikan di Pemkab Gianyar. Kata Windia, sepanjang kepemilikan RPH ini belum satu pemilik, maka kontrak pengelolaan dengan investor atau pihak ketiga akan sangat sulit dilakukan. "Kalau nanti dikontrakkan kepada pihak ketiga, jika terjadi kerusakan gedung atau peralatan, siapa yang bertanggungjawab," ujarnya. **Isa**

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 6



Tiga Pasar Mangkrak Solusi Gandeng KTNA ✓

AMLAPURA, NusaBali

Walapun sudah berdiri, namun tiga pasar besar di Karangasem tidak seperti yang diharapkan. Ketiga pasar itu: Pasar Desa Manggis, Pasar Hewan Pempatan dan Pasar Bunga dan Buah di Banjar Singarata, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Karangasem.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karangasem I Gusti Ngurah Suarta berjanji menggandeng KTNA (kelompok tani nelayan andalan), agar pasar beroperasi optimal, terutama Pasar Bunga dan Buah. Diakui janji mengoperasikan pasar itu sejak 3 Februari 2015, belum kesampaian, karena terjadi penolakan para pedagang.

Sedangkan Pasar Desa Manggis, di Banjar Belong, Desa/Kecamatan Manggis, yang dioperasikan mulai 14 Februari 2014, mulanya memberdayakan 291 pedagang, ternyata satu persatu meninggalkan lokasi jualannya, hingga pasar tersebut kurang berfungsi. Padahal sebanyak 291 pedagang itu mendapatkan dukungan 14 banjar adat se-Desa Manggis: Banjar Pegubugan, Bakung, Siig, Pande Besi, Pande Batur, Anyar, Belong, Surabaya, Tengah, Taman Sari, Kawan, Candi, Kelodan dan Tri Wangsa. Pasar di lahan 2 hektare dengan pembangunan dua tahap, tahap I Rp 530 juta dan tahap II Rp 300 juta. Mulanya pasar itu dibuka pagi mulai pukul 03.00 Wita, ternyata yang tersisa hanya segelintir pedagang warung, berjualan di sore hari di Pasar Desa Manggis itu.

Bahkan lebih parah lagi Pasar Hewan Pempatan, di Desa Pempatan,

Kecamatan Rendang yang beroperasi sejak 21 Januari 2007, terbangun dengan biaya Rp 518 juta, sama sekali tanpa aktivitas. Padahal di wilayah itu sentra ternak sapi.

Begitu juga yang terakhir, Pasar Bunga dan Buah, di Banjar Singarata, tuntas 3 Februari 2015, ternyata tak mampu memindahkan aktivitas pedagang yang jualan di pinggir jalan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang ke pasar itu. "Makanya kami mencoba mengajak bekerjasama dengan KTNA yang ada, agar Pasar Bunga dan Buah berfungsi," jelas Gusti Suarta.

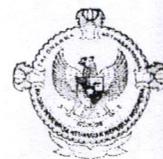
Sejumlah pedagang buah di Pasar Senggol Desa Menanga, dihubungi rata-rata enggan pindah ke Pasar Bunga dan Pasar Buah, di Banjar Singarata. Walau jaraknya hanya sekitar 1 kilometer ke selatan. Pedagang buah Ni Nyoman Rai dan Ni Made Mokoh dari Banjar Menanga Kawan, Desa Menanga enggan pindah karena telah cocok jualan di pasar sebelumnya. Begitu juga pemilik kios, Ni Wayan Sri

Marini dari Banjar Menanga Kawan, juga kurang sreg membuka usahanya di pasar yang baru terbangun. "Apalagi Pasar Senggol Menanga dan Pasar Desa Menanga telah tertata, lantai telah dirabat beton," kata Sri Marini.

Ketua KTNA Kecamatan Rendang I Gusti Ngurah Alit, mengaku belum diajak berkoordinasi. "Belum ada yang menghubungi, jika diperlukan kami tetap siap bekerjasama, untuk memajukan ekonomi kerakyatan," jelas I Gusti Ngurah Alit, dihubungi di Banjar Palak, Desa Besakih, Kecamatan Rendang. **k16**

Edisi : Jumat, 11 September 2015

Hal : 6



Tim Investasi Tinjau Pabrik Beton Cor

SINGARAJA, NusaBali

Untuk mengetahui kebenaran dokumen permohonan izin prinsip pabrik pencampuran beton cor di Desa Bungulan, Tim investasi Pemkab Buleleng turun ke lokasi di Kecamatan Sawan tersebut pada Kamis (10/9) pagi.

Tim yang berasal dari sejumlah instansi lingkup Pemkab Buleleng itu, tiba di lokasi pabrik sekitar pukul 09.00 wita. Tim yang dikordinir Sekretaris Tim yang juga Kabag Ekbang Pemkab Buleleng, Ketut Suparto diterima oleh penanggungjawab pabrik Purnomo. Sayangnya, di lokasi tidak ada aktivitas, karena pabrik sedang dalam masa penyesuaian hingga izin diurus.

Kendati pabrik tidak beroperasi, tapi sejumlah pekerja di lokasi masih terlihat, termasuk sejumlah alat dalam proses pencampuran beton cor tersebut. Rombongan tim sempat meminta penjelasan terkait dengan dokumen yang diajukan dalam permohonan izin prinsip. Keterangan diberikan langsung oleh penanggungjawab Purnomo, dan sudah dicatat oleh tim.

Sekretaris Tim Ketut Suparto mengatakan, pihaknya hanya ingin mendapatkan data dan fakta terkait aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Data ini menyangkut beberapa hal teknis termasuk pengamatan di lapangan serta meminta keterangan dari pihak penyanding di sekitar lokasi perusahaan. Penelusuran ke lapangan ini menjadi salah satu tahapan sebelum nantinya tim investasi menyerahkan seluruh berkas permohonan izin prinsip kepada Bupati. "Tim akan merapatkan kembali untuk mengkaji hasil penelusurannya. Data di lapangan dan berkas persyaratan yang diajukan itu akan diajukan kepada Bupati melalui Asisten II dan Sekkab untuk diambil keputusan oleh Bupati," tegasnya.

Sementara pihak penanggungjawab pabrik Purnomo mengatakan, sejak pabrik disegel pihak Pol PP yang turun bersama anggota DPRD Buleleng, pihaknya tidak beraktivitas. Pihaknya berusaha melengkapi perizinan yang



PABRIK pencampuran beton cor di Desa Bungulan yang masih disegel. Tim Investasi Buleleng Tinjau Pabrik Beton Cor, Kamis (10/9).
* NUSABALI/MADE SUDIRTA

dibutuhkan dengan mematuhi regulasi yang ada. "Kita sudah mohonkan izin prinsip untuk selanjutnya mengurus perizinan yang diperlukan," terangnya.

Sejauh ini dokumen permohonan izin prinsip dari pihak perusahaan pencampuran beton cor di Desa Bungulan dinyatakan telah lengkap. Dokumen itu di antaranya persetujuan penyanding di lokasi pabrik dan dukungan dari pihak desa dinas maupun adat atas kehadiran

perusahaan tersebut. Nah, dari dokumen permohonan itu, tim investasi memiliki kewajiban memastikan kebenaran dari dokumen tersebut dengan survei lapangan. Dari hasil survei lapangan dan mengecek kebenaran dokumen, tim investasi akan susun kajian yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan izin prinsip diberikan atau tidak oleh Bupati.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD

Buleleng I Ketut Susila dan I Made Adi Purnawijaya menyoroti keras keberadaan pabrik pencampuran beton cor di Desa Bungulan tersebut. Pabrik itu dianggap melanggar Perda RTRW karena kawasan Desa Bungulan masuk kawasan pengembangan pariwisata. Selain itu, pabrik tersebut juga dinilai telah merugikan Pemkab Buleleng, karena pabrik tersebut telah beroperasi sejak bulan Mei 2015 lalu, tanpa memberikan

kontribusi pendapatan buat daerah.

Pabrik itu sendiri berada di bawah bendera PT Tunas Jaya Beton. Awalnya pabrik itu hanya sebagai pendukung sejumlah proyek Pemkab Buleleng, di antaranya perbaikan jalan dengan pembeconan di Jalan Udayana, Singaraja. Kemudian pembangunan IRD RSUD Buleleng termasuk pembangunan kolam renang Pidada untuk kepentingan Porprov Bali. **k19**